

**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap  
Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kecamatan  
Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu**

**Alya Fitri Shagita<sup>1</sup>, Rini Indriani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu  
alyafitrishagita18@gmail.com , rindriani@unib.ac.id

**ABSTRACT**

*This study was conducted to determine whether accountability, transparency and community participation have an influence on Village Fund Management in the Village Government of Nasal District 2023. The analysis tool in this research uses the help of the SmartPLS software program version 4.0 which consists of evaluating the outer model and inner model. This research is included in descriptive research and is clauseal. The population in this study is the Village Government of Nasal District. Sampling in this study used Nonprobability sampling technique with saturated sampling method so that 85 respondents were obtained from all village officials at the Nasal District Village Government. The results show that accountability has a significant effect in a positive direction on village fund management in the Village Government of Nasal District, Kaur Regency in 2023. Transparency has a significant effect in a positive direction on the management of village funds in the Village Government of Nasal District, Kaur Regency in 2023. Community participation has a significant effect in a positive direction on the management of village funds in the Village Government of Nasal District, Kaur Regency in 2023.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Management, Good Governance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal 2023. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan bantuan program software SmartPLS versi 4.0 yang terdiri dari evaluasi outer model dan inner model. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dan bersifat klausal. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sekecamatan Nasal. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh sehingga didapatkan 85 responden dari seluruh aparat desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada Tahun 2023. Transparansi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada Tahun 2023. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada Tahun 2023.

**Kata kunci:** *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, Good Governance*

## **PENDAHULUAN**

Masalah utama yang sedang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi hambatan besar bagi kemajuan Indonesia dalam mencapai status negara maju. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia harus melakukan upaya-upaya besar yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, mendorong kesetaraan, dan mendiversifikasi lanskap ekonominya. Data yang tersedia dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan angka kemiskinan di daerah pedesaan melebihi angka kemiskinan di daerah perkotaan. Penegasan itu didukung bukti empiris pada September 2022 yang menunjukkan angka kemiskinan di perdesaan berada pada angka 12,36% atau setara dengan total 14,38 juta jiwa. Sebaliknya, angka kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 7,53% atau setara dengan 11,98 juta jiwa. Prevalensi kemiskinan di perdesaan jauh lebih besar, yaitu sebesar 96,36%, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam angka kemiskinan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Karena tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah pedesaan, maka diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kekuasaan dan sumber keuangan yang cukup untuk mengelola potensi dan mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dana Desa didanai oleh anggaran kabupaten bersumber dari APBN yang diberikan langsung kepada desa. Seluruh dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung membiayai penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, serta pembinaan kemasyarakatan

Oleh karena itu, untuk mewujudkan desa yang maju dengan ciri tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan demokrasi yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan fasilitas, maka perlu dialokasikan anggaran untuk pemberdayaan serta pembangunan masyarakat di desa. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan pelayanan dan infrastruktur penting. Proses manajemen dana desa mencakup sejumlah tahapan penting, antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengadministrasian dana desa secara menyeluruh memerlukan landasan yang berakar pada prinsip transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. Pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan penerapan prinsip tata kelola yang baik di setiap daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014, khususnya pada ayat 2, mengatur tentang pengaturan pengalokasian dana desa. Peraturan tersebut didasarkan pada berbagai faktor seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat kesulitan topografi desa serta wilayah geografis di daerah kota atau kabupaten.

Kabupaten Kaur memiliki 15 Kecamatan dan 3 kelurahan, salah satunya yaitu Kecamatan Nasal yang memiliki 17 desa dengan luas 519.92 km<sup>2</sup> yang dihuni

sebanyak 16,941 jiwa. Desa Air Palawan di Kecamatan Nasal mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp 945,2 juta. Jumlah ini melebihi alokasi DD yang diterima oleh 191 desa lain di 15 Kecamatan Kabupaten Kaur. Sebagian besar desa-desa lain hanya menerima sekitar Rp 700 juta hingga Rp 800 juta, ini disebabkan karna angka kemiskinan yang sangat tinggi di Desa Air Palawan Kecamatan Nasal (Bengkuluexpres.com 2023) Adapaun masalah lainnya seperti adanya keterlambatan dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban dana desa (Radarkaur.disway 2022) dan masih kurangnya perhatian terhadap jalan sentral produksi sehingga masih banyak jalan rusak yang ada di Kecamatan Nasal terkhususnya di desa yang berada di daerah dataran tinggi (Wartaprima.com) dengan jumlah dana desa yang cukup besar, pemerintah desa di Kecamatan Nasal belum optimal dalam mengalokasikan dana tersebut secara maksimal dan belum tercapainya pengalokasian dana desa sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ini merupakan permasalahan yang kini sedang dihadapi. Kondisi ini kemudian berkontribusi pada masalah ketidaktransparan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan proses penggunaan dana desa tersebut.

Dari berbagai latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### ***Agency Theory***

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Dewi & Gayatri, 2019) mengungkapkan bahwasanya Konsep korelasi keagenan pada teori keagenan mengacu pada pengaturan dimana suatu perusahaan dibentuk oleh serangkaian kontrak, biasanya disebut sebagai nexus kontrak. Perjanjian kontrak ini berfungsi untuk membentuk hubungan formal antara pemilik suatu aset ekonomi, yang disebut prinsip, dan seorang manajer, yang dikenal sebagai agen, yang memikul tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur penggunaan aset tersebut. *Agency theory* sering digunakan sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan fenomena penipuan akuntansi. Tujuan dari studi ini ialah guna mengatasi dua tantangan umum dalam hubungan keagenan, terutama karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal (Maruhun & Thatok Asmony, 2019).

Menurut (Iznillah & Basri, 2019) konsep *Agency Theory* mengacu dalam konteks hubungan kontraktual antara dua pihak, yakni agen dan *principal*. Pihak *principal* memberikan tugas kepada agen atau pihak lain, untuk menjalankannya. Dalam pengelolaan dana desa, *Agency Theory* akan berguna untuk menjelaskan hubungan antara direktur dan agen. Selain itu, *Agency Theory* berpendapat bahwa sering terjadi ketidaksamaan informasi antara pihak agen yakni pemerintah dan pihak principal yakni masyarakat.

### **Akuntabilitas**

Menurut (Ramadhani & Yuliati, 2021) Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban organisasi untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan mekanisme yang ditetapkan dan diterapkan secara teratur. Selain itu, Menurut (Mardiasmo, 2019) Akuntabilitas publik mengacu pada tanggung jawab yang melekat pada entitas yang berwenang untuk menjamin transparansi dan mengungkapkan seluruh tindakan dan kewajibannya kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk menerima dan mengakui akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama akuntabilitas internal, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab individu terhadap kekuatan yang lebih tinggi, seperti Tuhan dan kedua akuntabilitas eksternal, yang mengacu pada kewajiban individu terhadap lingkungan sekitarnya (Aprila & Sepriani, 2019). Dalam ruang lingkup kajian ini, akuntabilitas dikonseptualisasikan sebagai kewajiban untuk menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap masyarakat umum (Farida, Jati, & Harventy, 2018). (Cholis & Fadli, 2019) mengungkapkan bahwasanya Dampak akuntabilitas publik terhadap kinerja lembaga pemerintah cukup besar. Hal ini memerlukan pemberian penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai seluruh aspek urusan publik, meliputi tahapan perencanaan hingga tahap pelaporan selanjutnya.

### **Transparansi**

Transparansi, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, termasuk adanya tindakan penyebarluasan informasi keuangan kepada masyarakat dengan cara yang jujur dan mudah diakses. (Purwanti, 2021) mengungkapkan bahwasanya Transparansi adalah upaya yang sengaja dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan tujuan memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Untuk menumbuhkan kepercayaan publik, transparansi memainkan peran penting dengan memastikan akses yang memadai terhadap informasi yang dapat dipercaya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menafsirkan tindakan yang diambil oleh lembaga, sehingga memfasilitasi pemahaman yang jelas mengenai permasalahan dan pemeriksaan kebenarannya.

### **Partisipasi Masyarakat**

Menurut (Mardiasmo, 2019), mengungkapkan bahwasanya partisipasi menyertakan keterlibatan aktif dari individu dalam proses pengambilan keputusan, melalui secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dapat difasilitasi oleh lembaga perwakilan yang melibatkan aspirasi masyarakat. Tindakan keterlibatan ini menggaris bawahi pentingnya menggunakan kebebasan untuk membangun koneksi, terlibat dalam wacana, dan berkontribusi dengan cara yang positif. Sementara itu, (Putra & Rasmini, 2019) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif individu dalam berbagai urusan pemerintahan, dengan tujuan memberikan pengaruh pada evaluasi dan administrasi kegiatan pemerintahan, sekaligus mengurangi risiko penyelewengan kekuasaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sesuai dengan (Sugiyono, 2018), Metodologi yang dipakai pada studi ini dilandasi oleh prinsip positivisme, dimana data dikumpulkan baik dari populasi atau sampel yang representatif dengan menggunakan instrumen penelitian. Data yang dihimpun selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, dan hipotesis diuji secara ketat. Penelitian ini menggunakan metodologi survei guna menghimpun data dengan teknik membagikan kuesioner pada seluruh pemerintah desa di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian deskriptif dan pengujian hipotesis, yang bertujuan untuk menjelaskan atribut-atribut variabel dan hubungan antar variabel. Penelitian ini dilakukan secara ilmiah di lapangan dan tidak melibatkan intervensi data, oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian dalam lingkungan yang tidak dirancang. Organisasi Pemerintah Desa Kecamatan Nasal adalah unit analisis yang digunakan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang diteliti pada penelitian ini ialah Pemerintah Desa Kecamatan Nasal. Studi ini memakai strategi *nonprobability sampling*, dengan menggunakan metode *sampling jenuh*. Partisipan yang diikutsertakan pada penelitian ini ialah aparat pemerintah desa di Kecamatan Nasal. Menurut data BPS Kaur, struktur pemerintahan Kecamatan Nasal meliputi beberapa perangkat desa yakni Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi). Peneliti akan mengambil 5 sampel pada setiap desa sehingga jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 85 responden dari 17 desa yang ada di Kecamatan Nasal

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memakai data kuantitatif yang bersumber dari data primer sebagai dasar analisis dan interpretasi. Strategi pengumpulan data terkadang melibatkan penyebaran kuesioner, dimana responden diberikan pertanyaan tertulis dan diharapkan memberikan balasan tertulis sebagai balasannya. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk menilai variabel yang diidentifikasi oleh peneliti. Pada studi ini, peneliti memakai skala Likert ordinal.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan bantuan *program software SmartPLS* versi 4.0. Program perangkat lunak ini memfasilitasi evaluasi model luar dan model dalam. Penentuan besar sampel didasarkan pada metode yang melibatkan perkalian jumlah indikator dengan faktor yang berkisar antara 5 sampai 10 (Ferdianand, 2006). Penelitian ini menggunakan total 17 indikator, dengan jumlah sampel minimal 85 sampel, sehingga diperoleh perkalian 5 dengan jumlah indikator. Sesuai dengan pertimbangan peneliti, maka dipilihlah sampel sebanyak 96 orang berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam penelitian.

## Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis statistik deskriptif untuk menguji data yang digunakan. Perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis adalah SmartPLS, khususnya *Smart Partial Least Square* versi 4.0, yang digunakan untuk menyederhanakan prosedur analisis statistik dan pengelolaan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktikal			Std. Deviation	Skala Interval
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean		
Akuntabilitas	85	4	20	24	5	20	16.60	2.835	4.15
Transparansi	85	6	30	36	14	30	25.15	2.388	4.19
Partisipasi Masyarakat	85	6	30	36	15	30	24.96	2.126	4.16
Pengelolaan Dana Desa	85	6	30	36	13	30	25.39	3.028	4.23

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2023

### Uji Outer Model

*Outer model* berfungsi sebagai alat pengukuran untuk mengevaluasi validitas dan ketergantungan model tertentu. Validitas Konvergen dan Validitas Diskriminan biasanya digunakan dalam evaluasi validitas, sedangkan reliabilitas dapat dievaluasi melalui pemeriksaan *Cronbach's Alpha* atau *Composite Reliability*.

### Uji Validitas Data

#### Validitas Konvergen

Penilaian validitas konvergen model pengukuran dengan indikator reflektif meliputi pengujian korelasi antara nilai item atau nilai komponen. Suatu variabel dianggap asli jika memiliki *nilai Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5 dan nilai faktor pemuatan > 0,7. Jika nilainya tidak sesuai dengan kriteria tersebut, maka variabel yang digunakan dianggap tidak valid. Temuan terkait penilaian validitas konvergen disajikan pada tabel bawah ini:

Tabel 2. Outer Loading

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Hasil
Akuntabilitas (X1)	AK1	0.725	Valid
	AK2	0.850	Valid
	AK3	0.927	Valid
	AK4	0.910	Valid
Transparansi (X2)	T1	0.727	Valid
	T2	0.816	Valid

	T4	0.830	Valid
	T5	0.805	Valid
	T6	0.737	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	PM1	0.813	Valid
	PM2	0.886	Valid
	PM3	0.819	Valid
	PM4	0.868	Valid
	PM5	0.871	Valid
Pengelolaan Dana Desa (Y)	PDD1	0.810	Valid
	PDD2	0.730	Valid
	PDD3	0.741	Valid
	PDD4	0.827	Valid

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2023

Pada uji validitas konvergen ini menghapus pernyataan pada indikator yang nilai outer loadingnya  $< 0.7$ . Berdasarkan tabel di atas indikator dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Dana Desa dikatakan valid secara signifikan karena nilai outer loading  $> 0.7$ .

#### Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan merupakan aspek penting dalam metodologi penelitian, karena berfungsi untuk menetapkan perbedaan yang jelas antara setiap elemen penyusun variabel laten yang diteliti dan variabel lain yang termasuk dalam penelitian. Validitas diskriminan dianggap memuaskan bila setiap indikasi menunjukkan nilai faktor muatan tertinggi dibandingkan dengan nilai faktor muatan lainnya. Tabel 3 menyajikan hasil penilaian validitas diskriminan melalui pemeriksaan cross loading.

**Tabel 3. Discriminant Validity**

	<b>Akuntabilitas</b>	<b>Partisipasi Masyarakat</b>	<b>Pengelolaan Dana Desa</b>	<b>Transparansi</b>
AK1	<b>0.725</b>	0.266	0.203	0.344
AK2	<b>0.850</b>	0.289	0.340	0.363
AK3	<b>0.927</b>	0.451	0.548	0.425
AK4	<b>0.910</b>	0.407	0.541	0.402
PDD1	0.457	0.554	<b>0.810</b>	0.445
PDD2	0.479	0.352	<b>0.730</b>	0.402
PDD3	0.305	0.476	<b>0.741</b>	0.350
PDD4	0.375	0.434	<b>0.827</b>	0.469
PM1	0.428	<b>0.813</b>	0.456	0.496
PM2	0.316	<b>0.886</b>	0.416	0.294
PM4	0.398	<b>0.819</b>	0.357	0.452
PM5	0.290	<b>0.868</b>	0.494	0.229
PM6	0.403	<b>0.871</b>	0.673	0.390
T1	0.176	0.243	0.347	<b>0.752</b>
T2	0.333	0.213	0.390	<b>0.816</b>

T3	0.343	0.247	0.440	<b>0.830</b>
T4	0.467	0.484	0.512	<b>0.805</b>
T5	0.398	0.478	0.399	<b>0.737</b>

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2023

Berdasarkan tabel yang tersedia terlihat bahwa seluruh konstruk dalam model telah memenuhi kriteria validitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading faktor seluruh indikator pada variabel laten melebihi nilai loading faktor lainnya pada variabel laten yang sama. Selain pendekatan yang disebutkan di atas, terdapat teknik alternatif untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Salah satu caranya ialah dengan melakukan perbandingan antara nilai AVE setiap konstruk dengan koefisien korelasi antara seluruh konstruk dengan konstruk lainnya. Hasil pengujian AVE ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4. Nilai AVE**

Variabel	Nilai AVE
Akuntabilitas	0.734
Partisipasi Masyarakat	0.726
Pengelolaan Dana Desa	0.606
Transparansi	0.622

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2023

Berdasarkan temuan yang disajikan pada tabel 4, bisa diambil kesimpulan bahwasanya seluruh konstruk memenuhi standar validitas yang telah ditetapkan, ditunjukkan dengan nilai AVE > 0,5. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwasanya data yang diperoleh dari variabel-variabel tersebut dipandang valid dan reliabel.

### Uji Reliabilitas

Dalam penelitian reliabilitas ini, peneliti menguji nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* untuk menilai ketergantungan variabel yang diteliti. Suatu variabel dapat dianggap dapat reliabel jika mempunyai nilai > 0,6 dan *Composite Reliability* > 0,7. Tabel di bawah menampilkan hasil pengujian *Composite Reliability* dan *Alpha Cronbach's Alpha*

**Tabel 5. Hasil Pengujian *Composite Reliability* dan *cronbach's Alpha***

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)
<b>Akuntabilitas</b>	0.884	0.916
<b>Partisipasi Masyarakat</b>	0.907	0.930
<b>Pengelolaan Dana Desa</b>	0.782	0.860
<b>Transparansi</b>	0.849	0.891

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2023

Berdasarkan tabel di atas, variabel akuntabilitas dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's Alpha* dari variable tersebut adalah sebesar 0.884 > 0.6 dan nilai *Composite Reliability* dari variable akuntabilitas sebesar 0.916 > 0.7. Variabel

partisipasi masyarakat dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's Alpha* dari variabel tersebut adalah sebesar  $0.907 > 0.6$  dan nilai *Composite Reliability* dari variable partisipasi masyarakat sebesar  $0.930 > 0.7$ . Variabel pengelolaan dana desa dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's Alpha* dari variable tersebut adalah sebesar  $0.782 > 0.6$  dan nilai *Composite Reliability* dari variable pengelolaan dana desa sebesar  $0.860 > 0.7$ . Variable transparansi dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's Alpha* dari variable tersebut sebesar  $0.849 > 0.6$  dan nilai *Composite Reliability* dari variable transparansi sebesar  $0.891 > 0.7$ .

### Uji Inner Model

Pada penelitian ini dilakukan penilaian inner model. Pemanfaatan inner model ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan koefisien determinasi (R-squared) dalam model penelitian.

### R-Square (R<sup>2</sup>)

R-square di dalam model struktural dipakai untuk menilai konstruk dependen. Tabel ini menyajikan hasil uji R-square.

**Tabel 6. Hasil Pengujian R-Square**

Variabel Y	R-Square	R-Square Adjusted
Pengelolaan Dana Desa	0.488	0.469

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2023

Berdasarkan data pada tabel terlihat bahwa nilai R-Square variabel dependen pengelolaan dana desa (Y) adalah sebesar 0,488. Koefisien determinasi sebesar 48,8% menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependen pengelolaan dana desa (Y) dan variabel independen yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) dapat menjelaskan sebagian besar varians dalam variabel dependen. Porsi yang belum terhitung sebesar 51,2% dapat disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam ruang lingkup penelitian ini.

### Uji Multikolinier

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui adanya interkorelasi atau kolinieritas antar variabel independen dalam suatu model regresi. Sebelum melakukan uji hipotesis, biasanya dilakukan penilaian multikolinieritas dengan menguji uji VIF. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinier**

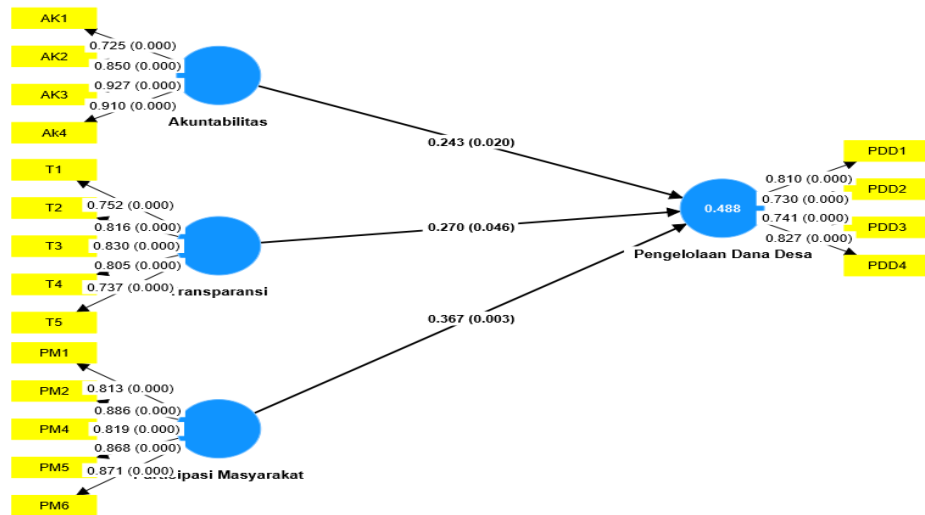
Variabel	VIF
Akuntabilitas -> Pengelolaan Dana Desa	1.370
Partisipasi Masyarakat -> Pengelolaan Dana Desa	1.348
Transparansi -> Pengelolaan Dana Desa	1.372

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, terlihat skor *Inner Variance Inflation Factor* (VIF) untuk akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi masing-masing sebesar 1.370, 1.348, dan 1.372. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai inner VIF setiap variabel independen < 5. Hal ini memberikan bukti bahwa variabel independen tidak dipengaruhi multikolinearitas dengan variabel dependen.

**Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)**

Pendekatan *bootstrapping* digunakan untuk pengujian hipotesis dalam analisis Partial Least Squares (PLS). Tujuan dari pengujian *bootstrapping* juga untuk mengurangi adanya ketidaknormalan pada data yang digunakan untuk penelitian. Hasil analisis *bootstrapping* yang dilakukan dengan SmartPLS 4 ditampilkan pada gambar berikut :



Sumber : Data Olahan SmartPLS 2023

Pengujian hipotesis parsial menggunakan uji t digunakan untuk melakukan analisis. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi signifikansi statistik dari hipotesis dengan menganalisis koefisien yang diperoleh. Menurut Hair (2018), jika nilai t melebihi 1,96 (dengan p-value kurang dari 0,05), maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya ditemukan korelasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, begitu pula sebaliknya. Hasil komprehensif setelah penerapan *bootstrapping* bisa diamati pada tabel berikut:

**Tabel 8. Pengujian Hipotesis Berdasarkan *Path Coefficient***

Variabel	Original Sampel (O)	Sampel Mean	St. Deviation	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Ket
Akuntabilitas	0.243	0.256	0.104	2.335	0.020	Signifikan
Pengelolaan Dana Desa						

Partisipasi Masyarakat -> Pengelolaan Dana Desa	0.367	0.377	0.124	2.952	0.003	Signifikan
Transparansi ->Pengelolaan Dana Desa	0.270	0.247	0.135	1.996	0.046	Signifikan

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2023

Berdasarkan tabel yang tersaji, uji hipotesis menyelidiki potensi pengaruh Akuntabilitas Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Hasil analisis pengujian menunjukkan nilai koefisien yang berhubungan dengan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa bahwa hasil *t-statistic* telah melebihi 1,96 dengan p-values yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai original sampel menunjukan berpengaruh positif sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variable pada tiap hipotesis memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa

## Pembahasan

### Hipotesis 1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Temuan analisis hipotesis awal menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,243 dan nilai t-statistik sebesar 2,335 berada di atas nilai sebesar 1,96 (>1,96). Hal ini memberikan bukti yang mendukung penerimaan hipotesis pertama. Penelitian ini memberikan bukti yang mendukung anggapan bahwa peningkatan akuntabilitas berkorelasi positif dengan peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga memudahkan tercapainya tata kelola yang baik. Konsep akuntabilitas secara luas dipandang bermanfaat karena dukungan responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju dengan pilihan yang diberikan. Penetapan akuntabilitas sangat penting untuk pelaksanaan tujuan organisasi secara efektif. *Agency Theory* dikaitkan dengan variabel akuntabilitas, Agen (aparatus desa) bertanggung jawab atas kegiatan administrasi pemerintahan desa kepada *principal* (masyarakat desa). Dalam konteks khusus penelitian ini, akuntabilitas mempunyai arti penting dalam memastikan pengawasan yang tepat terhadap alokasi dana desa. Penyelenggaraan program pemerintah desa dapat meningkatkan reputasi pemerintah dengan menumbuhkan rasa percaya dan akuntabilitas di kalangan masyarakat lokal dan masyarakat. Penelitian dari (Wiratna Sujarweni, 2015) (Jabida Latuamury, 2022) dan (Dewi et al., 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa dan secara parsial terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Berdasarkan temuan penelitiannya, terlihat bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang baik terhadap pengelolaan dana desa.

### Hipotesis 2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Temuan analisis hipotesis kedua membuktikan nilai koefisien sebesar 0,367 dan nilai t-statistik sebesar 2,952 berada di atas nilai sebesar 1,96 (>1,96). Akibatnya,

hasil ini memberikan bukti yang mendukung penerimaan hipotesis kedua. Penelitian ini memberikan bukti yang mendukung adanya korelasi positif antara peningkatan partisipasi masyarakat dengan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat pada pengelolaan keuangan desa, dimana masyarakat menyampaikan tujuan dan kepentingannya kepada pemerintah daerah. *Agency Theory* menjelaskan asimetri informasi, terutama ketika agen tidak menerima informasi yang sama seperti principal. Melalui partisipasi aktif masyarakat, akan timbul peningkatan semangat masyarakat terhadap pembangunan desa, sehingga mendorong terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Menurut (Wiratna Sujarweni, 2015). (Jabida Latuamury, 2022) dan (Dewi et al., 2019) dalam penelitiannya, transparansi mempengaruhi pengelolaan dana desa secara signifikan. (Putra & Rasmini, 2019) Pernyataan di atas menegaskan bahwa transparansi mempunyai peran konstruktif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

### **Hipotesis 3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan nilai koefisien sebesar 0,270 dan nilai t-statistik sebesar 1,996 berada di atas nilai 1,96 ( $>1,96$ ). Hal ini memberikan bukti yang mendukung penerimaan hipotesis ketiga. Penelitian ini memberikan bukti yang mendukung anggapan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat transparansi pengelolaan dana desa dengan efektivitas pengelolaan tersebut. Partisipasi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat (Mardiasmo, 2019). Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa pengadministrasian dana desa telah dilakukan secara transparan, dibuktikan dengan aksesibilitas dokumen, penyediaan informasi yang jelas dan komprehensif, keterbukaan proses, dan adanya kerangka peraturan yang menjamin transparansi. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu cara bagi prinsipal untuk menilai kinerja agen. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh (Jabida Latuamury, 2022) dan (Hasanah, 2021) Menurut peneliti, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa membuahkan hasil yang baik (Putra & Rasmini, 2019) ditegaskan lebih lanjut bahwasanya keterlibatan masyarakat memberikan kontribusi yang positif dalam hal efektivitas pengelolaan dana desa.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa Kecamatan Nasal, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana desa. Kedua, transparansi juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa. Terakhir, partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa. Untuk memastikan bahwa tercapainya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan terlaksana dalam pemerintahan desa di Kecamatan Nasal, diperlukan langkah-langkah yang

sesuai dan tepat dalam pelaksanaan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa yang baik (*Good Governnace*).

Dengan hasil penelitian ini bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan dan mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik, efisien serta mampu memberikan keyakinan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini terbatas hanya pada pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas ukuran sampel, menambahkan variabel penelitian lainnya, serta menerapkan metodologi wawancara guna mengurangi potensi bias informasi dalam penelitian tersebut

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprila, N., & Sepriani, E. (2019). Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Akuntabilitas Terhadap Organization Citizenship Behavior Di Institusi Militer (Tni-Ad) Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 13–34. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.13-34>
- Cholis, N., & Fadli, F. (2019). Pengendalian Intern Pemerintah Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Bengkulu ( Studi Pada OPD Kota Bengkulu ). *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 145–154. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.3.145-154>
- Dewi, C. K., Ikbali, M. A., & Moh, F. (2019). The Influence of Accountability, Transparency and Organizational Commitments to Village Fund Management in Momunu District, Buol Regency. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Farida, Jati, & Harventy. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Hasanah. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Komitmen, Kompetensi, Serta Spiritual terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i2.13>
- Jabida Latuamury, A. M. T. (2022). *Participation and Organizational Commitment on the Effectiveness of Village Fund Management in Teluk Ambon*. 06(01), 23–32.
- Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*.
- Maruhun, & Thatok Asmony. (2019). Menyibak Tabir Pengelolaan Dana Desa Dari Perspektif Habermas. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1),

63-75. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i1.5>

- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561-571. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. PT.Afabeta.
- Wiratna Sujarweni, V. (2015). *Metodologi penelitian bisnis ekonomi*.